

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan dalam peran instansi pemerintah yang terkait dalam pengawasan keamanan pangan berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenangnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instansi pemerintah yang terkait dalam upaya pengawasan keamanan pangan seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Instansi-instansi tersebut dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan saling berkoordinasi dan melakukan penyidikan gabungan dalam upaya pengawasan keamanan pangan untuk menciptakan konsumsi pangan yang aman dikonsumsi.
2. Faktor penghambat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap keamanan pangan, kurangnya pengetahuan para pelaku usaha dan konsumen akan akibat yang timbul jika mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya, kurang memadainya sarana dan prasarana instansi pemerintah terkait misalnya tidak mempunyai laboratorium. Sedangkan faktor pendukungnya, koordinasi yang baik antar instansi terkait pengawasan keamanan pangan dan komitmen bersama disetiap instansi untuk mencapai tujuan yang diamanatkan.

B. Saran

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan keamanan pangan penulis memberikan sedikit saran terkait dengan hubungan antar instansi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan. Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar koordinasi dalam hubungan instansi pemerintah yang terkait dalam pengawasan keamanan pangan seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan Kepolisian Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih jelas dan maksimal, diharapkan kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih pangan dan bahan tambahan pangan yang akan dikonsumsi.
2. Agar lingkup pengawasan keamanan pangan disetiap instansi diperluas lagi, adanya ketegasan hukum dalam menindaklanjuti para pelaku usaha yang merugikan masyarakat, dan adanya transparansi dari instansi pemerintah apabila ada kasus yang menyangkut dengan keamanan pangan untuk menambah informasi publik.